



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG 2026

Jalan Belimbing Raya No. 2
Sungai Pinang Kode Pos 70675

kec-sungaipinang.banjarkab.go.id

kecsungaipinangbanjar@gmail.com





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah yang menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang untuk 1 (satu) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan program dan kegiatan Kecamatan guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Pinang sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Demikian Rencana ini dapat kami susun, semoga dapat digunakan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan serta dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dan instansi yang berkepentingan khususnya bagi Kecamatan Sungai Pinang Dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya

Sungai Pinang, 24 Juli 2025
CAMAT SUNGAI PINANG,

MARWATA, SE
16690217 198903 1 003



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara perencanaan pada Perangkat Daerah tahun 2026 dengan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan satu tahun yang merupakan komitmen Perangkat Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD tahun 2026

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan:

- a. RKPD Tahun 2026; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 6

Setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan rencana program yang telah termuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dituangkan dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan pada Perangkat Daerah dan Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang	6
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025	10
2.1.2 Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu (Tahun 2024)	27
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Sungai Pinang	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG.....	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026	40
3.1.2 Prioritas Nasional	40
3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.....	41
3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2026.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang.....	45
3.3. Program dan Kegiatan.....	47
3.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan	49
3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG	51
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Banjar	18
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar	28
2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Banjar	32
3.1.	Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan	31
3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang	46
4.1.	Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Pinang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang didasarkan pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”, maka Kecamatan Sungai Pinang mendukung pencapaian misi 4 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Pinang berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Rencana kerja Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang dan rancangan awal;
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan Perkada RKPD awal;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029



(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor ...).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra 2025-2029, dan RPJMD Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 ini adalah :

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2025-2029;
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan Laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



- BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang
Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sungai Pinang
- BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang
Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- BAB V. Penutup
Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang

Pada tahun 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang mengampu Urusan Kecamatan melaksanakan 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4. Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5. Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6. Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terdiri dari:
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1.1. Sub Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:



- 4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 6.1.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 6.1.4. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 6.1.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 2.235.734.954,00,- (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar **84,95%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 2.631.828.048,00,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)**.

Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun **2024** sebesar **83,87%** dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran:
 - a) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan indikator Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan realisasi capaian sebesar 50 Persen (50%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 100 Persen.



- b) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia realisasi capaian sebesar 0 Laporan (0%) lebih rendah dari target yang ditetapkan 1 Laporan.
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran:
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 100% dari target 100%
 - b) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - c) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - d) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - f) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - h) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - i) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - j) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi 100% dari target 100%
 - k) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan realisasi 100% dari target 100%
 - l) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi 100% dari target 100%
 - m) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi 100% dari target 100%
 - n) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
 - o) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
 - p) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
 - q) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
 - r) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%



- s) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
 - Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
 - a. Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja:
 - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
 - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja.
 - b. Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja:
 - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
 - Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
 - Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang, yaitu:

Dengan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Sehingga berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
 - Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
 - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
 - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
 - Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
 - Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
 - Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Sungai Pinang, namun demikian untuk Indikator dari kegiatan yang sekarang menjadi indikator pada sub kegiatan masih tetap sama. Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan 6 Program 15 Kegiatan 38 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 1.4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1.6.1. Pengadaan Mebel



- 1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 - 1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
 - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terdiri dari:
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
 - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:
 - 3.1.1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - 4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:
 - 4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan



Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 6.1.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 6.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 6.1.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 6.1.5 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Total pagu dana untuk melaksanakan 6 Program 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Sungai Pinang adalah sebesar **Rp2.887.930.160,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Seratus Enam Puluh Rupiah).**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi oleh perangkat Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar pada tahun berjalan atau tahun-tahun yang akan datang.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan masing-masing indikator, guna mendukung pencapaian misi Bupati yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis ”**. Total anggaran untuk 6 Program, 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp2.631.828.048,-



(Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.235.734.954,- (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 84,95%.

Sedangkan untuk Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.887.930.160,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan II (dua) adalah sebesar Rp.1.315.578.682 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 44,62%

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2024 dan realisasi sampai dengan tahun 2025 triwulan ke II (dua) sebagai berikut :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Banjar

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN					
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1	KECAMATAN													
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor/ Indeks	80	63,97	76	77,32	101,74	78	NA	NA				
7	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00				
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	30	6	6	6	100,00	13	25	83,33
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	NA	2	40,00
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	NA	2	40,00
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	NA	2	40,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN					
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	NA	2	40,00
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	3	NA	NA	NA	NA	3	75,00
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	NA	4	4	100,00	1	5	31,25
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	NA	NA	NA	NA	2	100,00
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	NA	2	2	100,00	2	4	50,00
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	NA	14	14	100,00	18	32	45,71



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN					
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	NA	14	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	NA	2	2	100,00	12	14	23,33
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	NA	2	NA	NA	NA	NA	2	NA
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4	1	1	100,00	1	6	120,00
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	NA
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	NA	4	4	100,00	4	8	40,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.1.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	2	1	NA	NA	NA	NA	1	50,00
7.1.1.2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	8	NA	2	2	100,00	1	3	37,50
7.1.1.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	0	1	1	100,00	2	3	50,00
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	5	5	5	100,00	1	11	44,00
7.1.1.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	1	1	100,00	NA	2	50,00
7.1.1.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	10	10	10	100,00	1	21	42,00
7.1.1.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	125	NA	25	25	100,00	1	26	20,80



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	3	3	3	100,00	1	7	46,67
7.1.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	NA	NA	NA	NA	10	10	83,33
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	NA	12	12	100,00	12	24	50,00
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	NA	NA	NA	NA	1	1	0,00
7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	2	2	2	100,00	6	10	83,33
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	NA	1	1	100,00	1	2	50,00



KODE					BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
										Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	NA	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	NA	12	12	100,00	12	24	40,00
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	NA	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	7	12	12	100,00	9	28	77,78
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	NA	1	1	100,00	18	19	633,33
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	1	1	100,00	1	4	200,00
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	0	2	2	100,00	4	6	60,00
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7 1 2 2,04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	29	4	7	7	100,00	1	12	41,38
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	11	11	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	38	NA	11	11	100,00	21	32	84,21
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	NA	NA	NA	1,00	2	2	20,00
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	50	50,00	100	100	100,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.4.7.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	11	NA	3	3	100,00	2	5	45,45
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	NA	2	2	100,00	1	3	30,00
7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	NA	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	50	50,00	100	100	100,00
7.1.4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	1	1	0	0,00	1	2	25,00
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	160	NA	40	40	100,00	40	80	50,00
7.1.5.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.5.2.01.7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10	2	2	2	100,00	1	5	50,00
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00



KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja 2024	Realisasi Kinerja 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.1.6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	3	1	1	1	100,00	1	3	100,00
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7.1.6.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
7.1.6.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	5	0	1	1	100,00	NA	1	20,00

Sumber:

- LKJIP Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024
- Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Kecamatan Sungai Pinang Kab. Banjar 2025

Jika melihat realisasi capaian kinerja 6 Program, 15 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 di atas, dimana capaian Tahun 2024 sebesar 84,95% untuk semua program/kegiatan/subkegiatan subkegiatan, sedangkan capaian realisasi tahun 2025 sampai dengan triwulan II masih di bawah 100% untuk semua program/kegiatan/sub kegiatan karena perkiraan bahwa target capaian akhir untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai di Triwulan IV/akhir.

2.1.2 Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu (Tahun 2024)

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2024 yang telah dilaporkan pada Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 maupun Laporan Petanggungjawaban Kerja Tahun 2024, terlihat bahwa capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 jika di banding dengan target kinerja pada akhir periode Renstra 2021-2026 sampai dengan tahun berjalan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 di atas capaiannya cukup bagus sehingga dengan melihat kondisi ini maka optimis target akhir Renstra bisa tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Sungai Pinang Sehingga dalam hal Kecamatan perangkat daerah tidak memiliki indikator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja utama dan target sasarnya pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

No	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan: Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten			85	86	87	87	84,81	84,83	87,1	87,2	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.
1.1	Nilai Evaluasi Kecamatan			77	77	81	81	83,62	96,67	97,25	97,50	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sumber data:

- Matriks Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2022-2026

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 yang terdiri dari indikator sebagaimana tercantum dalam tabel, bisa memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Realisasi Tahun 2024 bisa melampaui target yang ditetapkan dimana realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Pada Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dengan Sasaran target 2026 sebesar **81,00**

Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut :

Faktor penghambat:

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan,
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa belum maksimal,
- Kurangnya pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya dikarenakan kurang jelas dan detail menyangkut uraian tugas masing-masing personil sehingga seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan
- Seringnya pemadaman listrik yang menyebabkan terhentinya aktivitas karena banyak peralatan yang bergantung pada tersedianya listrik agar dapat berfungsi dan tugas-tugas lainnya pula memerlukan Listrik
- Infrastruktur Jalan yang kurang baik menghambat pergerakan serta kegiatan tak berlangsung lancar
- Koneksi internet yang tidak stabil menghambat berbagai urusan layanan masyarakat dan laporan ke instansi pemerintah secara online yang tentu saja mengharuskan adanya koneksi internet yang stabil.

Faktor pendukung:

- Terjalinnnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.
- Koordinasi yang baik secara terus menerus antar pegawai meningkatkan dan menjaga efektivitas organisasi semaksimal mungkin dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan kerja interdependen yang beragam.
- Perencanaan yang baik terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan.
- Terasilitasnya sebagian besar prasarana yang di perlukan dalam menunjang kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Sungai Pinang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sungai Pinang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.

- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersediaan peralatan Komputer.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersediaan signal internet yang memadai.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Pinang adalah :

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Sungai Pinang akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Sungai Pinang itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Sungai Pinang sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 adalah :

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Sungai Pinang

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok



ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Analisa terkait perbandingan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 dengan hasil analisis Kebutuhan Kecamatan Sungai Pinang dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, serta catatan jika terdapat perbedaan baik itu perbedaan terkait rumusan program/kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian maupun perbedaan pagu indkatif, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :



Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2026 Kabupaten Banjar

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Pinang Kab Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	Rp2.579.552.128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Pinang Kab Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	80	Rp2.579.552.128	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	Rp8.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Rp8.100.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp1.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 Dokumen	Rp1.200.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp600.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp200.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp600.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.000.000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp3.500.000	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp1.000.000	
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Rp1.865.576.128	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persen	Rp1.865.576.128	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	Rp1.811.216.128,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	Rp1.811.216.128,00	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp53.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp53.160.000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp1.200.000	
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	Rp12.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persen	Rp12.500.000,00	
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp500.000	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp12.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp12.000.000	
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	Rp35.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persen	Rp35.800.000	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Rp800.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Rp800.000	
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Rp35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Rp35.000.000	
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Rp106.060.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100 Persen	Rp106.060.000	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp800.000	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp12.000.000	
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Rp2.000.000	
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp3.500.000	
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp2.760.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp2.760.000	
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp85.000.000	
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	Rp115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persen	Rp115.000.000	
28	Pengadaan Mebel	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Rp20.000.000	Pengadaan Mebel	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Rp20.000.000	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp95.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp95.000.000	
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Rp229.516.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	Rp229.516.000	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp1.750.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp1.750.000,00	
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp52.766.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp52.766.000	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp175.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp175.000.000	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	Rp207.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	Rp207.000.000	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	Rp140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp140.000.000	
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp22.000.000	
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp45.000.000	
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100 Persen	Rp32.648.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	100 Persen	Rp32.648.800	
39	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Rp10.302.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Rp10.302.800	
40	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp10.302.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp10.302.800	
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Rp22.346.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Rp22.346.000	
42	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	Rp22.346.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 Laporan	Rp22.346.000	
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persen	Rp76.995.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persen	Rp76.995.000	
44	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp76.995.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	100 Persen	Rp76.995.000	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp11.995.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp11.995.000	
46	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp65.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp65.000.000	
47	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persen	Rp24.962.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persen	Rp24.962.000	
48	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	Rp20.196.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	Rp20.196.000	
49	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp11.535.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp11.535.000	
50	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Rp8.661.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Rp8.661.000	
51	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp4.766.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 Persen	Rp4.766.000	
52	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Rp4.766.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Rp4.766.000	
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persen	Rp166.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persen	Rp166.400.000	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
54	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp166.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	Rp166.400.000	
55	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	Rp65.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	Rp65.000.000	
56	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	Rp101.400.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	Rp101.400.000	
57	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persen	Rp28.300.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persen	Rp28.300.000	
58	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp28.300.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	Rp28.300.000	
59	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	
61	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp2.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp2.500.000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
62	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	Rp19.800.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	Rp19.800.000	
63	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp2.000.000	

Sumber Data : Rancangan awal RKPD dan Renstra

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Kecamatan Sungai Pinang. Perbedaan terkait dengan indikator pada program penunjang, dan beberapa perbedaan pagu dana pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Sungai Pinang tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan/masyarakat.

BAB III TUJUAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2026 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2026. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2026 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2026 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

3.1.2 Prioritas Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 untuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

A. Transformasi Sosial

1. Penuntasan *stunting* dan percepatan eliminasi malaria khususnya di Kabupaten/Kota dengan kasus tinggi;
2. Wajib PAUD 1 (satu) tahun dan sekolah 12 (dua belas) tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya

B. Transformasi Ekonomi

1. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui :
 - a. Hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan
 - b. Berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan.
2. Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
3. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan Banjarbakula, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah

- dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
4. Pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk *aerocity*);
 5. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banjarmasin:
 6. Penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam dan persiapan interkoneksi transmisi Jawa-Kalimantan;
 7. Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola;
 8. Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- C. Transformasi Tata Kelola
1. Pengembangan smart givernment serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
 2. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
- D. Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas.
- E. Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
1. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi;
 2. Pengembangan irigasi di WS Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan;
 3. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kusan, Riam Kiwa dan tampungan air serbaguna serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air;
 4. Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman melalui sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik;
- Integrasi pendekatan struktural dan ninstruektural dengan menerapkan *nature based solution* untuk mereduksi banjir di kota Banjarmasin

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya.
- b. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan
- c. Peningkatan sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata), didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan
- d. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta penanganan

Bencana

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus pada Pelayanan Publik.

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2026

Sasaran Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional, Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat local serta dalam Upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Banjar disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional, arah kebijakan provinsi Kalimantan Selatan, dan isu-isu strategis ditingkat local, serta dalam Upaya memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dan isu strategis di daerah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pendidikan belum optimal
 - Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih belum merata
 - Sarana penunjang layanan Pendidikan yang berkualitas masih belum merata
 - Tata Kelola Pendidikan masih belum optimal
 - Minat dan kesempatan Masyarakat untuk menempuh Pendidikan di usia Pendidikan masih terbatas
 - Integrasi Pendidikan formal dan Pendidikan nin-formal keagamaan melalui penyetaraan Pendidikan masih terbatas
- b. Belum optimalnya penanganan stunting, kematian ibu dan bayi
 - Sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas belum merata
 - Kebutuhan tenaga medis dan paramedis masih belum tercukupi
 - Layanan rumah sakit masih belum optimal
 - Manajemen dan tata Kelola Kesehatan belum optimal
 - Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Kesehatan belum optimal
 - Kesadaran Masyarakat dalam mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan perlu ditingkatkan
- c. Layanan rehabilitasi dan perlindungan social masih belum optimal
 - Data penerima bantuan social masih perlu disesuaikan
 - Cakupan penerima bantuan social masih terbatas
 - Kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan social masih belum optimal
 - Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan masih belum optimal
- d. Belum optimalnya Upaya penanggulangan resiko kelompok rentan
 - Masih tingginya pernikahan dini/anak
 - Pemenuhan ruang dan haka nak yang masih belum optimal
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan singgah/penampungan
 - Belum optimalnya pengarusamaan gender
- e. Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
 - Deteksi dini dan sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal
- f. Pertumbuhan industry pengolahan belum optimal
 - Penggunaan teknologi produksi industry kecil menengah belum optimal

- Packaging produk industri kecil belum sesuai standar
- Kendala akses pemasaran produk
- g. Nilai tambah sektor pariwisata daerah masih rendah
 - Pengembangan daya Tarik destinasi wisata berdasarkan konsep 7 A pariwisata belum optimal
- h. Realisasi investasi belum optimal
 - Realisasi investasi sektor tersier masih rendah
 - Intensifikasi investasi sektor primer dan sekunder belum optimal
- i. Ekspor barang dan jasa daerah belum terealisasi
 - Belum adanya tadarisasi barang perdagangan
- j. Distribusi barang belum lancer
 - Sarpas perdagangan belum sesuai standar
 - Belum memiliki pusat distribusi regional
- k. Belum optimalnya kualitas koperasi
 - Belum adanya regenerasi SDM koperasi
 - Masih tingginya dominasi koperasi simpan pinjam
- l. Omzet usaha mikro belum optimal
 - Keberdayaan usaha mikro masih rendah serapan tenaga kerja belum optimal
 - Kapasitas Angkatan kerja daerah belum optimal
 - Lapangan kerja formal terbatas
- m. Produksi dan produktivitas sektor pertanian belum optimal
 - Produksi dan produktivitas pertanian kurang optimal
 - Produksi dan produktivitas peranakan tangkap dan budidaya belum optimal
- n. Ketahanan pangan belum optimal
 - Belum meratanya akses air baku
 - Menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian akibat alih fungsi lahan, serangan hama, perubahan iklim, dan bencana
- o. Belum optimalnya perlindungan, pengolahan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan optimal
 - Kurangnya Upaya pengelolaan keanekaragaman hayati
 - Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
 - Belum optimalnya perlindungan kerusakan lingkungan
 - Belum optimalnya pengelolaan sanitasi lingkungan
- p. Belum meratanya ketersediaan energi baru terbarukan
 - Penerapan energi baru terbarukan belum familiar
 - Belum optimalnya pemanfaatan potensi untuk sumber energi baru
- q. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan keselamatan
 - Belum meratanya penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan
 - Belum memadainya ketersediaan infrastruktur penangan bencana dan kebakaran
 - Belum meratanya cakupan pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran

- Penguatan regulasi dana tata Kelola kelembagaan penanganan bencana yang belum optimal
- r. Implementasi aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) belum optimal
 - Masih rendahnya antisipasi kebencanaan akibat perubahan musim/iklim
 - Pembentukan komunitas iklim belum maksimal
 - Pengelolaan limbah gas buang belum optimal
- s. Belum optimalnya konektivitas jaringan jalan
 - Tingginya angka kecelakaan
 - Belum optimalnya aksesibilitas distribusi orang dan barang
 - Belum memadainya aksesibilitas menuju Kawasan pariwisata dan pusat pertumbuhan
- t. Kurangnya akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan
 - Masih adanya permukiman dan perumahan yang belum terfasilitasi PSU
 - Masih adanya Kawasan kumuh
 - Tingginya backlog permukiman
- u. Belum optimalnya Akses Air Minum dan Sanitasi
 - Kurang terkelolanya sumber air baku
 - Belum optimalnya akses air minum aman
 - Belum optimalnya akses sanitasi aman
- v. Kurang tertatanya perkotaan Kabupaten
 - Kurangnya fasilitas pejalan kaki di jalan protokol perkotaan
 - Kurangnya etalase kota
- w. Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya
 - Capaian akuntabilitas kinerja yang belum konsisten
 - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
 - Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
- x. Pelayanan public yang belum optimal
 - Literasi Masyarakat terhadap pelayanan public digital masih rendah
 - Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
 - Belum optimalnya rentang kendali pelayanan pblik

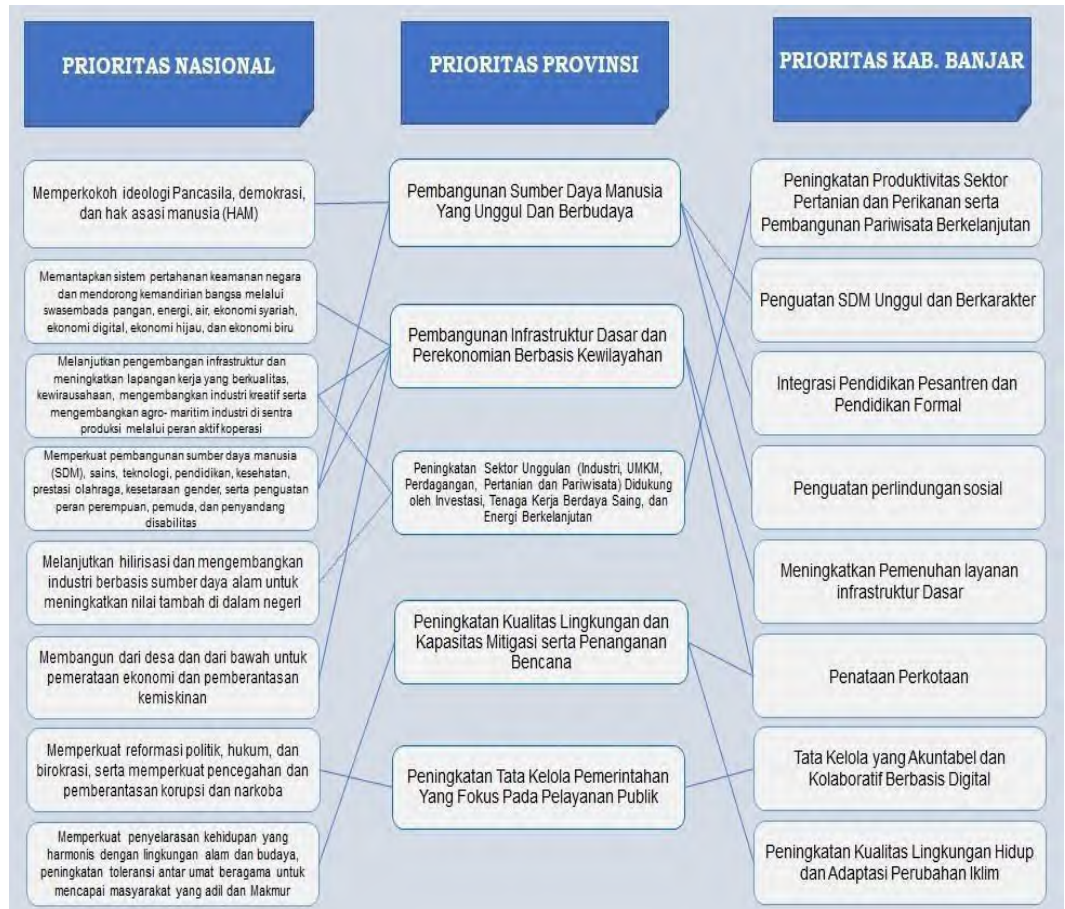
2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa isu strategis di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah pada Tahun 2026, yakni sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan serta Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
- 2) Pengautan SDM Unggul dan Berkarakter
- 3) Integrasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Formal
- 4) Penguatan perlindungan Sosial
- 5) Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar
- 6) Penataan Perkotaan
- 7) Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital
- 8) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah, dalam hal ini Kabupaten Banjar, dapat dilihat pada bagan berikut:

Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah (Kabupaten Banjar)



Berdasarkan penetapan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar pada Tahun 2026, Kecamatan Sungai Pinang masuk ke dalam Prioritas 7 (tujuh) yaitu **“Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Pinang Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2025 - 2029, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintah dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani”** yang diemban Kecamatan Sungai Pinang

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang

Visi	Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan
Misi	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani
Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Tujuan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Sasaran	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan 2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Evaluasi Kecamatan 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Target Tahun 2026	1. 87 2. 97 3. 58,65

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kecamatan Sungai Pinang menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Pinang kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Pengukuran indikator dimaksud dengan melakukan survey kepuasan Masyarakat sehingga didapatkan nilai terhadap 9 (Sembilan) unsul layanan Dimana perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran kedua bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Nilai Evaluasi Kecamatan merupakan hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap Tingkat kreatifitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan Masyarakat diwilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek, yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat

3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercermin dalam nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah. Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja Kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya nilai SAKIP menunjukkan bahwa Kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintah. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, Masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Untuk penukuran Nilai SAKIP Perangkat daerah dilakukan penilaian terhadap komponen Perencanaan, Komponen Pengukuran, Komponen Pelaporan dan Komponen Evaluasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut :

- 1) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target sebesar 87
- 2) Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, target sebesar 97
- 3) Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, target sebesar 58,65

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya misi 4 **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintah dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani”** , maka untuk mewujudkan hal tersebut ditentukanlah program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dari Kecamatan Sungai Pinang untuk mendukung salah satu prioritas daerah yaitu Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital, selain juga pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan tentunya dipilih untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini juga mengacu pada program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2026.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Kegiatan **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

- Kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

3.3.1. **Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan**

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Yaitu :

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintah dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani”

3.3.2. **Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2026 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 6 Program dengan 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pinang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan melingkupi semua Desa.
3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp.2,908,857,928,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Dua Puluh Delapan Rupiah).
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Pinang sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/ kegiatan. Adapun perbedaan satuan target dan pagu dana di beberapa program/kegiatan/subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang ditetapkan pada tahun 2026 di Kecamatan Sungai Pinang
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/ kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD, hal ini dikarenakan adanya pengurangan penyesuaian jenis belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD termasuk didalamnya adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2026 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2026 adalah sebanyak 6 program dengan 15 kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 6 Program dengan 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Total rencana kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan taun 2026 ini adalah sebesar Rp.2,908,857,928,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Dua Puluh Delapan Rupiah).

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang untuk Tahun Anggaran 2026 bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut:



Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN SUNGAI PINANG						2.591.298.104,00								2.982.188.686,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.591.298.104,00								2.982.188.686,00	
	7.01	KECAMATAN						2.591.298.104,00								2.982.188.686,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.227.977.504,00							-	2.632.752.886,00	
		[Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah]	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	84,00	77,32	78	80,00	2.227.977.504,00	-	-	-	-	-	-	2.632.752.886,00	-	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	15.989.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	10.430.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.876.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.999.200,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif	-		610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			210.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.122.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-			
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-			
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			1.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.368.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik			5.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.592.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-			



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	2.652.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan</i>	-			100 %	1.644.984.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	1.904.936.886,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				18 Orang/bulan	1.594.600.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.850.516.886,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	49.560.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		53.170.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	824.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	12.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	12.610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL		DAERAH			
1							1 Laporan	388.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	12.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	-			100 %	39.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	35.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	4.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	35.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	35.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran</i>	-			100 %	116.435.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	116.210.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.550.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	12.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2.475.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.105.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	3.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.305.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	2.770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	95.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	-			100 %	42.542.000,00				-	-	115.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	7.286.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		20.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	35.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		95.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-			100 %	189.242.892,00					-	-	229.526.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.100.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.760.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.442.892,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		52.766.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	128.700.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		175.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	-			100 %	167.140.012,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	208.020.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	121.520.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		141.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				18 Unit	20.620.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		22.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	25.000.012,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		45.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						23.940.000,00						-	42.668.800,00	
		[Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan]	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	100	100	100	23.940.000,00	-	-	-	-	-	-	42.668.800,00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	-			100 %	5.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	20.312.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	5.520.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		20.312.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	-			100 %	18.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	22.356.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				9 Laporan	18.420.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		22.356.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						83.980.000,00						-	87.005.000,00	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	<i>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</i>	100	100	100	100	83.980.000,00	-	-	-	-	-	-	87.005.000,00	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan</i>	-			100 %	83.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	87.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				11 Lembaga Kemasyarakatan	21.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		22.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	62.724.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		65.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						26.357.000,00						-	24.992.000,00	
		[Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum]	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	50	100	100	26.357.000,00	-	-	-	-	-	-	24.992.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	20.792.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	20.216.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	10.588.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		11.545.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				2 Laporan	10.204.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		8.671.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	-			100 %	5.565.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	4.776.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				1 Laporan	5.565.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		4.776.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						200.366.000,00						-	166.420.000,00	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	100	100	100	200.366.000,00	-	-	-	-	-	-	166.420.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	200.366.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	166.420.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	96.920.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		65.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				2 Dokumen	103.446.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		101.410.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						28.677.600,00						-	28.350.000,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa]	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100	100	28.677.600,00	-	-	-	-	-	-	28.350.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			100 %	28.677.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	28.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				1 Dokumen	2.321.600,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				12 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		19.810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	2.056.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
J U M L A H								2.591.298.104,00							2.982.188.686,00	

Sumber: Renja SIPD- ri Kecamatan Sungai Pinang 2026

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2026 yang berisi program/ kegiatan/ subkegiatan beserta indikator dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2026

Renja Kecamatan Sungai Pinang ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2026

Dalam hal ini ketersediaan anggaran sangat diperlukan prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja, sasaran indikator sasaran pada Renstra 2025-2029 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Sungai Pinang untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk seluruh pihak yang terlibat

Sungai Pinang 24 Juli 2025
GAMAT SUNGAI PINANG,

MARWATA, SE
NIP. 196902171989031003



LAMPIRAN



HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Juli 2025

Kabid Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

FARA HAYANI, S.P.
NIP. 197202251999032008

Kasubbid Pemerintahan
kecamatan

NURYAMI, S.E., M.M.
NIP. 197506061995032004

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut., M.Si
NIP. 197409232000031004



PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SUNGAI PINANG KAB. BANJAR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI PINANG						2.591.298.104,00							2.982.188.686,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.591.298.104,00							2.982.188.686,00	
	7.01	KECAMATAN						2.591.298.104,00							2.982.188.686,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.227.977.504,00							2.632.752.886,00	
		[Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah]	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	84,00	77,32	78	80,00	2.227.977.504,00	-	-	-	-	-	-	2.632.752.886,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persekitase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	-			100 %	15.989.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-	-	10.430.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.876.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-	-	1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.999.200,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-	-	610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.122.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada	-	-	210.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.368.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.592.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		5.550.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.652.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan	Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	-			100 %	1.644.984.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	1.904.936.886,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.594.600.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.850.516.886,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.560.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		53.170.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	824.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan	-			100 %	12.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum	05. Peningkatan Tata Kelola Pem	-	-	12.610.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengamanan Aset Barang Milik Daerah								dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	388.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		12.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	-			100 %	39.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	35.820.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	4.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											nyeludupan	dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	35.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		35.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran</i>	-			100 %	116.435.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	116.210.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	2.550.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	0,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		12.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2.475.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.105.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		3.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	9.305.400,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		2.770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	-		95.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	-			100 %	42.542.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan	-	-	115.200.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					8 Unit	7.286.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		20.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8 Unit	35.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		95.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	189.242.892,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	229.526.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2.100.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		1.760.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	58.442.892,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		52.766.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	128.700.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		175.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			100 %	167.140.012,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-	-	208.020.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	121.520.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-		141.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	20.620.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada	-		22.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital					
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														45.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.000.012,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	-				
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														23.940.000,00	
		[Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan]	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana	100	100	100	100	23.940.000,00	-	-	-	-	-	-	42.668.800,00	-	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			100 %	5.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	20.312.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														20.312.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5.520.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			100 %	18.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	22.356.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9 Laporan	18.420.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		22.356.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						83.980.000,00						-	87.005.000,00	
		[Meningkatkan pemberdayaan masyarakat]	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100	100	83.980.000,00	-	-	-	-	-	-	87.005.000,00	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	-			100 %	83.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	87.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	21.256.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		22.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan				2 Laporan	62.724.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang,	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum	05. Peningkatan Tata Kelola Pem	Elemen Masyarakat,		65.005.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan			
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						26.357.000,00						-	24.992.000,00	
		[Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	50	100	100	26.357.000,00	-	-	-	-	-	-	24.992.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	20.792.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	20.216.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	10.588.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		11.545.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	10.204.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		8.671.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	-			100 %	5.565.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum	7. Tata Kelola yang Akuntabel	Elemen Masyarakat,	-	4.776.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	dan Kolaboratif Berbasis Digital	Internal Kecamatan			
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	5.565.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		4.776.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						200.366.000,00						-	166.420.000,00	
		[Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum]	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	100	100	100	200.366.000,00	-	-	-	-	-	-	166.420.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	200.366.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	166.420.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	96.920.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		65.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>				2 Dokumen	103.446.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		101.410.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						28.677.600,00						-	28.350.000,00	
		[Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa]	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	100	100	100	28.677.600,00	-	-	-	-	-	-	28.350.000,00	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-			100 %	28.677.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan	-	28.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				1 Dokumen	2.321.600,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Pelayanan Publik 7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital				
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					12 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		19.810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					1 Dokumen	2.056.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola yang Akuntabel dan Kolaboratif Berbasis Digital	Elemen Masyarakat, Internal Kecamatan		2.010.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
J U M L A H								2.591.298.104,00							2.982.188.686,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SUNGAI PINANG

Jl. Belimbing Raya No. 02 Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang 70675
Website: <https://kec-sungaipinang.banjarkab.go.id> Email : kec.sungaipinang.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

KABUPATEN BANJAR

NOMOR 28.1 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

CAMAT SUNGAI PINANG

KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat SUNGAI PINANG Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26);



15. Peraturan Bupati Banjar Nomor xx tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yang ditetapkan tanggal 30 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat SUNGAI PINANG tentang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Pemerintah Kecamatan SUNGAI PINANG Kabupaten Banjar Tahun 2025
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Pemerintah Kecamatan SUNGAI PINANG Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Pemerintah Kecamatan SUNGAI PINANG Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUNGAI PINANG
Pada Tanggal : 28 Februari 2025



CAMAT SUNGAI PINANG

MARWATA, SE

Pembina TK.I/ IV. a

NIP. 196902171989031003



Lampiran: Keputusan Camat SUNGAI PINANG
Nomor : 28.1 Tahun 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	PenanggungJawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan, Keuangan, dan Aset	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota